

# SKRIPSI

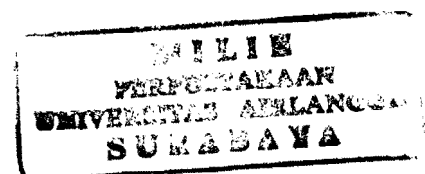
## PENDAFTARAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

Per 110 /05  
lab  
P



**MUHAMMAD IQBAL**  
039910537 U

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**PENDAFTARAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEPASTIAN  
HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN  
1999**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



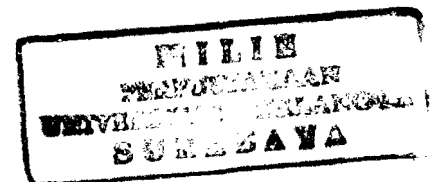
**LISMAN ISKANDAR, S.H., M.S.**  
Nip. 130675526

**Penyusun**



**MUHAMMAD IQBAL**  
Nim. 039910537 U

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Hal yang baru dalam Undang-Undang NO. 42 Tahun 1999 adalah tentang kewajiban pendaftaran hak Jaminan Fidusia. Pendaftaran tersebut diwajibkan dengan didasarkan pemikiran adanya asas spesialisitas dan asas publisitas serta sifat-sifat dari hak kebendaan. Ketentuan ini sekaligus sebagai jawaban dari kekacauan yang terjadi akibat tidak dilakukannya pendaftaran hak Jaminan Fidusia, sehingga tidak ada perlindungan dan kepastian hukum. Pendaftaran hak Jaminan Fidusia yang dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan sebagai bukti pendaftaran adalah terbitnya sertifikat hak Jaminan Fidusia, akan memberikan rasa aman terhadap kreditor, karena dengan pendaftaran maka sifat-sifat atau ciri-ciri hak kebendaan akan melekat pada Jaminan Fidusia.
- b. Dengan dipenuhinya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia akan membawa akibat hukum. Akibat-akibat hukum tersebut adalah penentuan lahirnya Jaminan Fidusia; terdapatnya larangan untuk melakukan fidusia ulang; lahirnya hak-hak kebendaan yang melekat pada hak Jaminan Fidusia. Selain itu pendaftaran (karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pemberi Jaminan Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia) diharapkan dapat memberikan Jaminan dan kepastian hukum kepada pihak kreditor, debitor maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2. Saran

- a. Agar para pihak mengetahui hak dan kewajibannya sehubungan dengan didaftarkannya hak Jaminan Fidusia, maka sangat diperlukan langkah-langkah sosialisasi yang berkelanjutan dari instansi-instansi yang terkait dan sesegera mungkin membentuk Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Pemerintah Kota maupun pemerintah kabupaten, sehingga cita-cita hukum yang diemban oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia akan cepat tercapai.
- b. Mengingat begitu pentingnya akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Jaminan Fidusia dan agar ketentuan peraturan perUndang-Undangan tentang Fidusia serta peraturan pelaksanaannya dapat memberikan perannya secara optimal, maka sangat diperlukan kesadaran dan itikad baik dari pihak-pihak pengguna Lembaga Jaminan Fidusia untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Fidusia.